

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan disebut juga dengan istilah pengembangan atau pembangunan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan. Jadi pemberdayaan merupakan upaya untuk memperoleh kekuatan dalam menguatkan diri dari segala bentuk penindasan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membentuk masyarakat menjadi lebih berdaya. Adi dalam Waryana (2016, hlm. 71) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan, sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan sosial, dari, oleh, dan untuk masyarakat secara swadaya. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Setiap warga masyarakat dalam sebuah lingkungan memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk dirinya dan lingkungannya menjadi lebih baik, tetapi terkadang tidak dapat berkembang karena faktor-faktor tertentu.

Untuk memberdayakan kemandirian pada masyarakat dalam pembangunan, maka dibutuhkan motivasi serta inovasi atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih maju. Proses tersebut dapat dilakukan melalui metode-metode pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan bentuk dari usaha pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar berperan serta aktif menjalankan program-program pembangunan secara mandiri dan berkesinambungan.

Ravik Karsidi (2001, hlm. 115) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat agar merubah kondisinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha memotivasi dan memberi dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara, antara lain, pendidikan untuk penyadaran dan kemampuan diri mereka.

Rancangan pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat selalu dikaitkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada hakikatnya, pemberdayaan dikaitkan pada tingkat kekuatan individu dan sosial. Peran serta masyarakat adalah unsur yang penting dalam proses pemberdayaan. Melihat pentingnya manfaat pemberdayaan masyarakat saat ini, oleh karena itu pemberdayaan dan pelayanan khusus untuk masyarakat merupakan prioritas yang utama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik untuk komunitas atau masing-masing keluarga.

Masalah ekonomi merupakan bagian terpenting dari pemberdayaan masyarakat, karena ekonomi dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam upaya pengembangan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat harus searah dengan aturan yang berlaku. Peran ekonomi dalam keluarga merupakan hal yang penting karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Skala prioritas pemberdayaan dimulai dari keluarga dengan memperhatikan faktor kondisi keuangan dan tempat tinggal.

Untuk dapat menunjang usaha pemberdayaan ekonomi di masyarakat dibutuhkan peran organisasi yang dapat mewadahi usaha-usaha tersebut. Organisasi yang dapat mewadahi adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pasal 2 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.

Melalui organisasi PKK terutama kaum perempuan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya agar dapat mandiri dalam mengatasi permasalahan yang mereka dihadapi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidupnya. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia adalah satu faktor penting yang harus terus diupayakan oleh PKK dalam pemberdayaan masyarakat terutama di era globalisasi saat ini.

Dalam era globalisasi saat ini peranan PKK dalam pengembangan masyarakat sangat dibutuhkan, maka organisasi PKK diharapkan dapat mengembangkan sikap dan perilaku, kemandirian, keluarga, dan masyarakat, agar dapat menerima era globalisasi. Sumber daya manusia yang baik dan tangguh merupakan salah satu faktor penting dalam bertahan di era globalisasi.

Dalam melakukan perannya kader PKK mempunyai program-program kerja. Salah satu dari program kerja yang dapat mewartakan pengembangan ekonomi adalah program kerja yang ke-3, yaitu mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Program kerja yang sesuai untuk usaha pemberdayaan masyarakat yaitu program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah Bank Sampah. Hal ini dikarenakan kondisi pengelolaan sampah yang terbatas hanya dari pemerintah sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan agar masalah tersebut dapat teratasi.

Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 11) pengelolaan sampah merupakan hasil yang penting untuk diperhatikan jika memang tidak ingin wilayah menjadi lautan sampah. Beragam upaya dilakukan seperti mencanangkan program 3R yakni *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (Kementrian Lingkungan Hidup, 2011). *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Salah satu konsep yang digunakan dalam mengatasi permasalahan mengenai sampah yaitu mensosialisasikan pengelolaan sampah, namun konsep ini tidak sepenuhnya berhasil dilakukan di Indonesia. Minimnya sosialisasi, kesadaran, dan peran serta

masyarakat merupakan persoalan utama. Selain itu tidak ada *best practice* pengelolaan sampah yang lebih mudah di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peran PKK dalam usaha mengedukasi masyarakat tentang nilai penting pengelolaan sampah. Dengan dikelolanya sampah maka sampah akan mempunyai nilai lebih yaitu nilai ekonomis.

Sampah akan memberikan nilai ekonomis jika jumlahnya sesuai untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai barang-barang yang bersifat ekonomi baik sebagai bahan baku (daur ulang) maupun sebagai komoditas perdagangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 3 Ayat 1 mengemukakan bahwa pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik Pasal 4 Ayat 1 mengemukakan bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui pengurangan dan penanganan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik Pasal 4 Ayat 2 mengemukakan bahwa pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi pembatasan timbulan Sampah Spesifik, pendaur ulang Sampah Spesifik dan pemanfaatan kembali Sampah Spesifik. Sehingga dapat dilihat pentingnya peran Bank Sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Oleh karena itu peran kader PKK diharapkan mampu mengelola Bank Sampah agar pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama keluarga dapat lebih maksimal dan mencapai sasaran. Sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan pendapatan keluarga. Husein Syahatah (1998, hlm. 102) pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam perekonomian yang berperan meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha baik berupa uang ataupun barang. Bentuk dari pengelolaan Bank Sampah di Wisata Edukasi Rumah Sampah Kampung Sempu Kramat yaitu pembuatan pot gantung dari botol plastik, pembuatan pakan ikan dari sampah basah atau dari sisa makanan,

pembuatan cairan pembersih lantai dari puntung rokok, pembuatan kerajinan tangan berupa tas dari tutup botol, baju dari kantong plastik, tikar dari bungkus kopi, vas bunga dari pecahan botol kaca, gantungan kunci dari bungkus makanan ringan, bros dari sedotan dan masih banyak lagi produk yang di hasilkan dari pengelolaan Bank Sampah yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 4 Ayat 2 mengemukakan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Untuk itu maka peningkatan pendapatan keluarga sangat penting dilakukan. Peran serta masyarakat khususnya keluarga secara aktif dan mandiri membatu kader PKK untuk lebih memaksimalkan usaha dan upaya dalam pengelolaan Bank Sampah.

Pengembangan pengelolaan Bank Sampah hendaknya dilakukan didaerah yang menghasilkan sampah yang cukup banyak. Tujuannya agar pengelolaan sampah lebih dapat mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan lebih maksimal dalam mengatasi masalah sampah. Salah satu daerah yang tepat untuk program Bank Sampah adalah Kabupaten Bekasi. Di daerah ini masih banyak masalah mengenai sampah yang tidak dapat ditanggulangi maka perlu adanya pengelolaan Bank Sampah. Peran kader PKK di wilayah Kabupaten Bekasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kader PKK dapat bekerjasama dengan anggota masyarakat terutama keluarga untuk kegiatan pengelolaan Bank Sampah. Hal yang dapat dilakukan adalah pengelompokkan sampah, cara membuang sampah, penyediaan tempat sampah agar lebih mudah dalam pengelolaannya, misalnya menggolongkan jenis sampah yaitu sampah basah dan sampah kering. Dengan dikelompokkan maka kita dapat mengetahui metode yang tepat untuk mengelolanya.

Unilever (2013, hlm. 4) sampah rumah tangga, secara umum terklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai kembali oleh alam, sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan

hasil olahan manusia. Sampah organik terdiri dari sisa makanan dan sisa organisme sedangkan sampah non-organik terdiri dari:

1. Sampah Kaca

Diantaranya adalah botol kaca, gelas kaca, dan toples. Sampah kaca dapat dihancurkan dan dilebur sebagai bahan baku produk baru.

2. Sampah Metal

Diantaranya adalah minuman kaleng dan makanan kaleng. Sampah besi dapat dilelehkan menjadi bahan dasar produk baru.

3. Sampah Kertas

Diantaranya adalah koran, majalah, karton, dan kardus. Kertas dapat dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru.

4. Sampah Plastik

Diantaranya adalah botol plastik, dan kemasan plastik. Sampah plastik dapat dilelehkan menjadi bijih plastik sebagai bahan dasar produk baru.

Diharapkan agar pengelolaan program Bank Sampah mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat serta memberikan efek positif bagi lingkungan. Salah satu tempat pengelolaan Bank Sampah oleh Kader PKK Pasir Gombang yang tepat dan dijadikan percontohan adalah Wisata Edukasi Rumah Sampah Kampung Sempu Kramat, yang beralamat di Kampung Sempu Kramat RT 04/004 Jalan Industri Jababeka 2 III D Desa Pasir Gombang Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Daerah tersebut merupakan daerah percontohan dalam pengelolaan Bank Sampah yang dikelola oleh kader PKK Pasir Gombang. Untuk itu pemerintah berharap agar daerah-daerah lain yang berada di Kabupaten Bekasi secara khusus dan Jawa Barat secara luas dapat menerapkan hal-hal yang dapat memberi nilai lebih untuk lingkungan dan keluarga melalui Bank Sampah.

Selain itu kesadaran masyarakat Kampung Sempu Kramat mengenai kebersihan lingkungan dan kesehatan sangat minim, dibuktikan dengan lingkungan yang terlihat kumuh dan banyak sampah yang menumpuk disebabkan adanya kenaikan jumlah penduduk karena daerah tersebut merupakan daerah yang dikelilingi oleh pabrik dan banyak pendatang yang tinggal di daerah ini serta

tingkat konsumsi rumah tangga mengakibatkan volume sampah meningkat setiap harinya di Kampung Sempu Kramat. Selain itu terbatasnya jumlah TPA sampah di Kabupaten Bekasi merupakan masalah penting yang perlu diatasi oleh karena itu partisipasi kader PKK perlu ditingkatkan dalam program Bank Sampah. Dengan adanya program pemberdayaan yang tepat maka permasalahan diatas dapat diatasi. Program pemberdayaan yang tepat adalah program Bank Sampah. Pada program Bank Sampah dapat berupa penyuluhan dan pembinaan tentang cara mengelola lingkungan dan sampah.

Penelitian ini perlu dilakukan karena permasalahan tersebut merupakan masalah harus diatasi dengan penanganan yang tepat. Kerjasama antara Kader PKK dan masyarakat yang baik dapat memaksimalkan hasil yang ingin dicapai pada program Bank Sampah. Hal itu dapat diwujudkan di Wisata Edukasi Rumah Sampah. Sehingga daerah lain disekitarnya dapat terinspirasi untuk ikut melaksanakan program Bank Sampah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka sangatlah menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah oleh Kader PKK dalam meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi di Wisata Edukasi Rumah Sampah Kampung Sempu Kramat Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Besarnya kenaikan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang yang mengakibatkan volume sampah meningkat setiap harinya di Kampung Sempu Kramat Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
2. Adanya permasalahan mengenai sampah yang menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan
3. Terbatasnya jumlah TPA sampah di Kabupaten Bekasi

4. Partisipasi anggota PKK dalam Bank Sampah di Kampung Sempu Kramat
5. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah di Wisata Edukasi Rumah Sampah Kampung Sempu Kramat yang di lakukan oleh kader PKK Pasir Gombang untuk meningkatkan pendapatan keluarga ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah di Wisata Edukasi Rumah Sampah Kampung Sempu Kramat yang dilakukan oleh kader PKK Pasir Gombang dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah:

1.5.1. Kegunaan Teoretis

1. Untuk menambah wawasan dunia pendidikan masyarakat, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah yang dikelola oleh kader PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Untuk menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan pada penelitian dimasa mendatang.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pihak Lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran tentang peran PKK dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengelolaan Bank Sampah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta lingkungan yang bersih.
3. Bagi Bank Sampah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan Bank Sampah oleh kader PKK yang sudah berjalan.

1.6. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1.6.1. Pemberdayaan Masyarakat

Wisnu Indrajit (2015, hlm. 81) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu arah kebijakan yang sangat penting dalam program penanggulangan ketertinggalan. Penanggulangan masyarakat dalam ketertinggalan bertujuan agar masyarakat dapat mengakses peningkatan kualitas kehidupan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lainnya. Upaya untuk merealisasikan tujuan itu diperlukan adanya program percepatan penanggulangan yang benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

1.6.2. Bank Sampah

Abdul Rozak (2014, hlm. 16) bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan. Penyetor adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank sampah serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

1.6.3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi (2012, hlm. I-6) PKK merupakan:

1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri.
3. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.
6. Tim Penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
7. Anggota TP PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai TP PKK.
8. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah TP PKK Desa/ Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
9. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 - 20 rumah (dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat), diketuai oleh salah seorang yang dipilih diantara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan yang diperlukan.
10. Kader Umum adalah mereka yang memahami, serta melaksanakan 10 program pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.

11. Kader Khusus adalah Kader Umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui orientasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK, instansi pemerintah atau lembaga lainnya.
12. Pelatih PKK adalah anggota TP PKK atau kader yang telah mengikuti pelatihan PKK dan metodologi pelatihan bagi tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, serta mendapatkan surat keputusan sebagai pelatih dari ketua Umum/ Ketua TP PKK daerah yang bersangkutan.
13. Pelindung utama PKK adalah isteri Presiden Republik Indonesia, yang bertugas memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.
14. Pelindung PKK adalah isteri Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertugas memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.
15. Dewan Penyantun TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/ lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh/ pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan jenjang pemerintahan. Agar Dewan Penyantun TP PKK lebih operasional, maka perlu adanya sekretariat Dewan Penyantun yang dipilih oleh Sekretaris Dewan Penyantun TP PKK Pusat,
16. Penasehat PKK adalah tokoh/ pemuka masyarakat di tingkat Pusat yang karena keahlian, pengetahuan dan pengalamannya mau membantu untuk keberhasilan pelaksanaan gerakan PKK, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK.
17. Sedangkan penasehat di Provinsi, Kabupaten/ Kota dapat diadakan sesuai keadaan dan kebutuhan, diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK yang bersangkutan.

Melihat pentingnya peran kader PKK dalam usaha pemberdayaan masyarakat khususnya program Bank Sampah maka peran masyarakat untuk

membantu tercapainya tujuan sangat dibutuhkan. Peran serta aktif dan mandiri adalah salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk peranan masyarakat mendukung program PKK terutama Bank Sampah.

1.6.4. Pendapatan Keluarga

Deti Wulandari (2015, hlm. 6) pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Karena pentingnya peningkatan pendapatan keluarga maka peran kader PKK harus dapat tepat sasaran agar tujuan yang dicapai dapat lebih maksimal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program Bank Sampah.